
EVALUATION OF THE OPERATIONAL ASSISTANCE MANAGEMENT (BOP) MANAGEMENT FUNDING PROGRAM AT THE BENGKULU CITY PAUD INSTITUTION

Emilda Sulasmi

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
emilda@umsu.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan di lembaga pendidikan anak usia dini di kota Bengkulu. Metode penelitian yang dipakai adalah evaluasi kebijakan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Model evaluasi yang digunakan adalah CIPP model yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Evaluasi model ini terdiri dari empat komponen yaitu: Context, Input, Process Dan Product. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah PAUD di Kota Bengkulu, guru- guru serta pihak yang terkait Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi tentang kebijakan dana BOP. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat kaitan antara kebijakan penyaluran dana BOP, perencanaan pelaksanaan penyaluran dana BOP, prosedur penyaluran dana BOP serta Hasil Pelaksanaan Penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan di lembaga PAUD Kota Bengkulu adanya bukti pencapaian tujuan bantuan BOP yaitu dilihat dari peningkatan kualitas pendidikan disegala bidang dengan bukti prestasi baik dari lembaga,guru dan murid.

Kata Kunci:

BOP

CIPP Model

Program Evaluasi

1. PENDAHULUAN

Perluasan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu prioritas kebijakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal. Untuk mendukung perluasan layanan harus ditunjang dengan ketersediaan Satuan PAUD yang mudah diakses, pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, Daerah dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan PAUD secara keseluruhan.

Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional satuan PAUD. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dengan memberikan bantuan dana penyelenggaraan kepada satuan PAUD yang memberikan layanan pada anak didik khususnya yang kurang mampu dan di wilayah sulit. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan Lembaga Bantuan Operasional Penyelenggaraan rata-rata biaya pelaksanaan pembelajaran. Termasuk dalam Biaya Operasional adalah kepada penyelenggara satuan PAUD yang memiliki peserta didik kurang mampu atau wilayah sulit.¹

Program BOP PAUD bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Untuk memberikan panduan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD.² Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD harus terus-menerus di salurkan karena dengan dana tersebutlah dapat menunjang kemajuan suatu sekolah dan dapat membantu orang-orang dengan ekonomi kebawah agar dapat merasakan bangku sekolah pada usia dini. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD juga harus bersifat adil jika salah satu PAUD atau lembaga bisa merasakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan, maka lembaga PAUD yang lain juga mempunyai hak yang sama untuk dapat merasakan hal yang sama.³ Dana BOP tersebut harus dapat dipergunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan lembaga serta mengikuti teknis penggunaan dana bantuan. Pengelolaan dana BOP PAUD di kota Bengkulu perlu diawasi oleh pemerintah Kota Bengkulu agar hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi misalnya penyalahgunaan anggaran. Sedini mungkin pemerintah Kota Bengkulu perlu menyiapkan aparatur pemerintah yang mempunyai kapasitas dan kompeten dalam pengelolaan dana BOP. Tidak hanya pada pemerintah, dilembaga dan juga komite sekolah perlu melakukan pengawasan pemerintah dan evaluasi dalam pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD di Kota Bengkulu. Tim manajemen BOP dilembaga PAUD memegang peranan penting dalam pengelolaan dana BOP PAUD . Mereka harus mengimplementasikan dana BOP PAUD ke lembaga-lembaga calon penerima Bantuan Anggaran Penyelenggaraan PAUD sesuai dengan juknis BOP sudah disosialisasikan dan dibagikan ke lembaga-lembaga, disamping itu mereka juga dituntut baik sisi pembukuan maupun sisi perpajakannya. Fakta yang sering terjadi dilapangan menunjukkan bahwa kinerja Tim manajemen BOP PAUD di lembaga belum sesuai dengan harapan sebagaimana mestinya. Diantaranya masih terjadi kekeliruan yang

¹Heru Winarsi, *Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (Bop) Pada Kelompok Bermain Ceria Kota Semarang*, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah Untag Semarang Issn : 2302-2752, Vol. 8 No. 1, 2019

²Putri Sianturi, Dkk, *Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (Bop) Paud (Pendidikan Anak Usia Dini) Menerapkan Metode Electre (Studi Kasus : Dinas*

Pendidikan Kabupaten Simalungun), Komik (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer) , Volume I, Nomor 1, Oktober 2017

³ Amin Nasir, *Dinamika Pengembangan Sistem Pendidikan (Kerangka Dasar Potensi Anak Usia Dini)*, Jurnal Ath-Tufula, Stain Kudus, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2014

terjadi dari segi perpajakan, kebanyakan sekolah membelanjakan sendiri, tidak sesuai juknis dan draf proposal yang diajukan, dibuktikan dengan adanya pengembalian berkas laporan akhir yang disebabkan oleh tidak sesuainya antara juknis dengan pelaporan yang ada. Mekanisme pengalokasian dana BOP sebagaimana yang telah di atur dalam pelaksanaannya menuntut adanya pengetahuan, kemampuan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang ternyata belum sepenuhnya dipenuhi oleh pengelolaan BOP. Kondisi ini tentu saja memberikan dampak pada standar evaluasi yang cenderung sulit dipenuhi secara optimal.

Alasan perlu diadakan penelitian ini karena dana BOP yang harus dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh lembaga merupakan sebuah amanah peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 yang disalurkan oleh pemerintah dapat berguna untuk menunjang kualitas pelayanan pendidikan yang ada pada sekolah, maka perlu penelitian evaluasi kinerja dalam bantuan operasional penyelenggaraan PAUD. Peneliti akan menggunakan model evaluasi CIPP dalam melakukan evaluasi pengelolaan dana BOP ini. Penelitian ini penting dilakukan karena terkait dengan layanan pendidikan anak usia dini yang menjadi kebutuhan dasar terutama untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Berdasarkan fokus penelitian maka secara konseptual ditetapkan sub fokus yang diteliti sebagai berikut: 1. Kebijakan penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan di Lembaga Paud Kota Bengkulu 2. Perencanaan pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan di Lembaga PAUD Kota Bengkulu 3. Prosedur Penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan di lembaga PAUD Kota Bengkulu, 4. Hasil pelaksanaan penyaluran dana Bantuan

Operasional Penyelenggaraan pada Lembaga PAUD Kota Bengkulu.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian mulai dari merumuskan masalah sampai dengan menarik kesimpulan³. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (naturalistik) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian suatu keutuhan.⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product).⁵ Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam⁶. Penelitian evaluatif model CIPP ini, menilai dari keempat komponen tersebut. Harapannya agar dapat digunakan sebagai masukan dalam pengelolaan dana BOP yang diterima oleh setiap lembaga PAUD seKota Bengkulu. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Terlaksananya keempat komponen tersebut sangat diharapkan dalam proses evaluasi ini. Jenis penelitian pada disertasi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. *Bogdan dan Taylor* mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷ Hal ini didasari pendapat

⁴ Warul Walidin, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh: Ftk Arraniry Aceh, 2015)., Hal., 23

⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tp, 1996), Hal. 29

⁶ Madaus, G.F., Scriven, M.S., & Stufflebeam, D.L., *Evaluation Models, Viewpoints On Educational And Human Services Education*, (Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing, 1993), Hal. 118

⁷ Bogdan, Robert C. And Taylors K.B. *Qualitative Researctch For Education An Introduction To*

Chaedar, bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Adapun model evaluasi yang digunakan adalah CIPP model yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Evaluasi model ini terdiri dari empat komponen yaitu: *Context*, *Input*, *Process* dan *Product*. Dapat menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah PAUD di Kota Bengkulu, guru-guru serta pihak yang terkait Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Penelitian ini adalah dengan menggunakan metode angket, wawancara, observasi dan dokumentasi tentang kebijakan dana BOP.

3. HASIL PENELITIAN

Berkaitan dengan evaluasi program BOP dalam kaitan *context* berikut disampaikan hasil evaluasi dimaksud. Hasil evaluasi terhadap *Context* yaitu kesesuaian antara implementasi rencana program BOP pada lembaga PAUD di Kota Bengkulu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kesesuaian tujuan, ketepatan sasaran penyaluran dana BOP dan manfaat dana BOP, berdasarkan angket yang disebarkan kepada seluruh sekolah yang dengan jumlah sampel ada 20 lembaga dari 173 lembaga PAUD yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan di Kota Bengkulu. Data angket hasil penelitian setelah direduksi dan di display yang disebarkan pada komponen **context**, pada kesesuaian program dengan kebijakan didapatlah presentase 15% untuk yang menjawab cukup sesuai, 70% untuk yang memberikan nilai sesuai dengan jumlah yang memberi nilai sesuai, 10% yang didapat dari jumlah yang memberi nilai sangat sesuai. Kategori kesesuaian tujuan dana BOP memperoleh nilai 10% dengan kategori cukup sesuai, 65% untuk yang menjawab sesuai dan pada kategori sangat sesuai terdapat 25%.

Pada pernyataan ketepatan sasaran BOP dapat ditinjau dari hasil angket yang di dapat terdapat nilai pada kategori cukup sesuai memperoleh nilai 15%, 55% untuk yang

memberikan nilai pada kategori sesuai, dan 25% untuk yang memberikan nilai pada kategori sangat sesuai. Pada pernyataan tentang manfaat dana BOP terdapat nilai pada kategori cukup sesuai di kategori manfaat dari dana BOP memperoleh nilai 15% dengan kategori cukup sesuai ,55% untuk yang memberikan nilai pada kategori sesuai dan 30% untuk yang memberikan nilai pada kategori sangat sesuai. Evaluasi terhadap komponen *input* dalam implementasi program dana BOP yang menunjukkan keefektifan perencanaan program BOP dari awal yaitu mulai dari persyaratan pengajuan usulan dana BOP, jumlah dana yang diterima, serta hak dan kewajiban dinas maupun lembaga dalam program dana BOP.

Berdasarkan hasil penelitian pada komponen **input** pada pernyataan persyaratan pengajuan dana BOP dapat ditinjau dari hasil angket yang di dapat terdapat nilai pada kategori cukup efektif memperoleh nilai 20% ,70% untuk yang memberikan nilai pada kategori efektif dan 10% untuk yang memberikan nilai pada kategori sangat efektif. Pada pernyataan jumlah dana yang diterima dapat ditinjau dari hasil angket yang di dapat terdapat nilai pada kategori cukup efektif memperoleh nilai 15% ,75% untuk yang memberikan nilai pada kategori efektif dan 10% untuk yang memberikan nilai pada kategori sangat efektif. Ditinjau dari hasil yang didapat dari angket yang disebarkan pada hak dan kewajiban terdapat nilai pada kategori cukup efektif memperoleh nilai 5%, 80% untuk yang memberikan nilai pada kategori efektif dan 15% untuk yang memberikan nilai pada kategori sangat efektif. Implementasi program pemberian dana BOP merupakan program langsung dari direktorat pembinaan pendidikan anak usia dini regional V dari Program ini telah di operasionalkan dalam wujud nyata berupa pelaksanaan program pemberian BOP ke satuan-satuan pendidikan anak usia dini (PAUD). Untuk merealisasikan program ini, maka setiap satuan pendidikan

membentuk tim/staf penerimaan dan pengelola dan BOP. Tim/ staf ini dibuatkan Surat Keputusan (SK) oleh kepala sekolah, dan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung yang penggunaannya berpedoman kepada petunjuk teknis penyaluran dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Kemudian berdasarkan hasil penelitian pada **proses** pelaksanaan ditinjau dari hasil yang didapat dari angket yang disebarkan pada penyusunan dana terdapat nilai pada kategori cukup sesuai memperoleh nilai 10% dengan kategori cukup sesuai, 70% untuk yang memberikan nilai pada kategori sesuai dan 20% untuk yang memberikan nilai pada kategori sangat sesuai. Pada penilaian dan verifikasi ditinjau dari hasil yang didapat dari angket yang disebarkan terdapat nilai pada kategori cukup sesuai memperoleh nilai 10% persen, 85% untuk yang memberikan nilai pada kategori sesuai dan 5% untuk yang memberikan nilai pada kategori sangat sesuai hasil. Pada penetapan penerima dana bantuan dari hasil yang didapat dari angket yang disebarkan terdapat nilai pada kategori cukup sesuai memperoleh nilai 10%, 65% untuk yang memberikan nilai pada kategori sesuai dan 25% untuk yang memberikan nilai pada kategori sangat sesuai. Hasil yang didapat pada penandatanganan akad kerjasama antara pemerintah pusat, diknas kota dan lembaga didapatkan presentase 20% untuk yang menjawab cukup sesuai, 55% untuk yang memberikan nilai sesuai & yang memberi nilai sangat sesuai terdapat 25%. Hasil yang didapat pada proses penyaluran dana BOP didapatkan presentase 10% untuk yang menjawab cukup sesuai, 60% untuk yang memberikan nilai sesuai & yang memberi nilai sangat sesuai terdapat 30%. Ditinjau dari pernyataan jadwal pengajuan terdapat nilai pada kategori cukup sesuai memperoleh nilai 15%, 65% untuk yang memberikan nilai pada kategori sesuai hasil dan 20% untuk yang memberikan nilai pada kategori sangat sesuai. Pada pengelolaan dana bantuan didapat pada kategori cukup sesuai memperoleh nilai 10%, 60% untuk yang

memberikan nilai pada kategori sesuai dan 30% untuk yang memberikan nilai pada kategori sangat sesuai. Pada konsep pelaporan memperoleh nilai 20% dengan kategori cukup sesuai, 60% untuk yang menjawab sesuai dan untuk yang memberikan nilai pada kategori sangat sesuai terdapat 20%.

Pada komponen proses dengan pernyataan tentang proses penyaluran dana BOP dengan tepat sasaran, salah satu Kepala sekolah pada lembaga PAUD yang menjadi objek penelitian yang mendapatkan bantuan dana BOP memberikan nilai cukup sesuai pada pernyataan tersebut Selanjutnya pada konsep **product**, pada pernyataan keberhasilan dalam penyelenggaraan dana BOP untuk lembaga PAUD dapat kategori cukup baik memperoleh nilai 20% dengan kategori cukup baik, 40% untuk yang memberikan nilai pada kategori sesuai dan 40% untuk yang memberikan nilai pada kategori sangat baik. Pada pernyataan tercapainya hasil yang diharapkan dari dana BOP bagi lembaga untuk memperluas dan meningkatkan mutu layanan PAUD presentase cukup baik hanya 10%, dan baik sebesar 35% dan sangat baik sebesar 55%. Serta pada Pada pernyataan hasil yang diharapkan dari dana BOP bagi diknas dapat ditinjau dari hasil angket yang di dapat terdapat nilai pada kategori cukup baik memperoleh nilai 15%, 45% untuk yang memberikan nilai pada kategori baik dan 40% untuk yang memberikan nilai pada kategori sangat baik. Berdasarkan dari hasil di atas dapat dilihat bahwa program dana BOP dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada.

4. PEMBAHASAN

Evaluasi adalah untuk mengambil keputusan tentang program dana BOP, evaluasi model CIPP untuk menggambarkan, mendapatkan, dan mengembangkan informasi yang berguna bagi penetapan alternatif-alternatif keputusan. Model CIPP sangat berkaitan dengan keputusan-keputusan yang terkait dengan para individu seperti guru dan

siswa, serta keputusan-keputusan yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya data evaluasi model CIPP, dievaluasi pengaruh keputusan-keputusan manajemen yang terkait dengan dana BOP. Proses utama pengevaluasian dengan tujuan pengungkapan informasi yang dibutuhkan, pengumpulan data, dan pengembangan informasi terhadap hal-hal yang penting. Berdasarkan pengevaluasian, keputusan tentang prosedur, keputusan tentang pengimplementasian, dan keputusan tentang tindak lanjut.⁸

Sesuai dengan jenis keputusan yang diambil, diklasifikasikan empat komponen pengevaluasian. Komponen tersebut adalah: 1. *context*; 2. *input*, 3. *process*, 4. *product*. Evaluasi tentang *context* dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang cermat tentang bagaimana kebijakan program dana BOP dan bagaimana kesesuaian antara program dan kebijakan yang berlaku, tercapainya tujuan dari BOP, Ketepatan sasaran BOP serta ketepatan strategi dalam penyaluran dana BOP. Evaluasi tentang *input*/masukan dimaksudkan untuk mengembangkan informasi bagaimana efektifitas perencanaan dalam program dana BOP. Evaluasi tentang proses dimaksudkan untuk melihat implementasi program dana BOP bagaimana ketepatan sasaran bantuan BOP yaitu untuk biaya pembelajaran, biaya peningkatan kualitas pendidikan di segala bidang serta adanya bukti prestasi lembaga, guru maupun siswa PAUD.

1) Komponen *Context*

Pemberian dana BOP diharapkan mampu mengatasi beban biaya operasional sekolah sesuai dengan tujuan yang dimaksud, yaitu meningkatnya mutu pendidikan di PAUD. Pembahasan hasil temuan evaluasi *Context* dalam investigasi pada beberapa aspek yaitu

melihat adanya strategi program pemerintah dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga yang kurang mampu, melihat adanya tujuan dana BOP dapat memperluas dan meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini, melihat adanya kebijakan pemerintah dalam upaya mempersiapkan dana untuk program dana BOP, melihat adanya ketepatan sasaran penerima bantuan dana BOP, adanya kesesuaian antara program dan kebijakan. Berdasarkan komponen *Context* tentang 1. Kesesuaian antara program dengan kebijakan untuk kategori cukup sesuai yaitu 15%, kategori sesuai sebanyak 70% dan kategori sangat sesuai sebanyak 15%. 2. Tercapainya tujuan untuk kategori cukup sesuai yaitu 10%, kategori sesuai sebanyak 65% dan kategori sangat sesuai sebanyak 25%, 3. Ketepatan sasaran BOP untuk kategori cukup sesuai yaitu 20%, kategori sesuai sebanyak 70% dan kategori sangat sesuai sebanyak 10%, 4. Ketepatan strategi dalam penyaluran BOP untuk kategori cukup sesuai yaitu 15%, kategori sesuai sebanyak 55% dan kategori sangat sesuai sebanyak 30%. Bila diperhatikan maka terdapat kesesuaian antara program pemerintah pusat dan daerah yaitu bahwa dana BOP bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk mampu menyekolahkan anak mereka sejak dini, bantuan juga bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa melalui bantuan-bantuan berbentuk buku pelajaran sehingga dapat membantu anak dalam proses pembelajaran agar perkembangan anak didik berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan, bantuan juga diperuntukan untuk biaya operasional pendidikan di lembaga

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Hal, 8

PAUD dengan bantuan BOP diharapkan tidak ada kendala-kendala yang berarti dalam pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga mampu mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan tujuan nasional pendidikan di Indonesia. Adanya ketepatan sasaran dana BOP yaitu semua lembaga yang mendapatkan bantuan adalah lembaga PAUD yang benar-benar layak dengan ketentuan jumlah murid dan lain-lain, yang akan diseleksi oleh pihak terkait.

2) Komponen *Input*

Pembahasan hasil temuan dalam evaluasi komponen *input* dikaitkan dengan hasil investigasi pada beberapa aspek, yaitu BOP untuk : 1. Persyaratan pengajuan dana proposal 2. Jumlah dana yang diterima 3. Hak dan kewajiban dinas maupun lembaga dalam program dana BOP. Berdasarkan data diperoleh dari angket yang disebar menunjukkan bahwa kerjasama antar instansi sebagai komponen input termasuk kategori cukup efektif berkisar antara 5%-20%; efektif 70%-80%; dan sangat efektif 10%-20%. Dalam proses ini tidak terdapat kendala yang berarti, tugas masing-masing, BPPAUD sebagai balai naungan yang memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga PAUD, Pemerintahan Kota/Kabupaten memberikan penyuluhan tentang bantuan BOP melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, tugas pemerintahan Provinsi melalui Dinas Pendidikan dengan adanya penyuluhan tersebut pihak diknas dapat menyampaikan persyaratan yang ada, jumlah yang diterima setiap lembaga dan hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh lembaga penerima dana bantuan operasional penyelenggaraan.

3) Komponen *Process*

Hasil yang didapat dari komponen proses program bantuan dana BOP yang meliputi delapan aspek 1. Penyusunan dana pengajuan proposal 2. penilaian dan verifikasi proposal 3. Penetapan penerima bantuan 4. Penandatanganan akad kerjasama antara pemerintah pusat, diknas kota dan lembaga 5. Proses penyaluran dana bantuan 6. Jadwal pengajuan bantuan dana BOP PAUD 7. Pengelolaan dana bantuan dan 8. Pelaporan dana BOP.

Program ini telah dioperasionalkan dalam wujud nyata berupa pelaksanaan program pemberian BOP ke satuan-satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk merealisasikan program ini, maka tiap satuan pendidikan membentuk tim/staf penerimaan dan pengelola dana BOP. Tim/staf ini dibuatkan Surat Keputusan (SK) oleh Diknas, dan sanggup menangani kegiatannya selama program berlangsung yang penggunaannya berpedoman kepada peraturan BPPAUDNI.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Sejalan dengan program pemerintah, program peningkatan mutu layanan PAUD dilaksanakan berdasarkan delapan standar penyelenggaraan PAUD sesuai dengan PERMENDIKNAS nomor 137 tahun 2014.

Peningkatan mutu pendidikan itu hanya akan terjadi secara efektif, jika dikelola melalui manajemen yang tepat.⁹ Artinya bahwa bagaimana mengkalkulasikan semua program dengan dana dan SDM yang memadai agarantisipasi kemungkinan-kemungkinan mana yang prioritas karena semua harus dilaksanakan khususnya peningkatan mutu secara keseluruhan sinkronisasi pembiayaan dengan prioritas program serta target yang ingin dicapai. Dalam

⁹ Hasan Baharun, *Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga*

Pendidikan Islam, Jurnal Ilmu Tarbiyah "At-Tajdid", Vol. 5 No. 2, Juli 2016

pandangannya bahwa peningkatan mutu sekolah adalah proses yang sistematis bertahap dan terus menerus dilakukan untuk mengatasi apa yang dibutuhkan, sehingga kualitas proses hasil pembelajaran dan faktor-faktor yang berkaitan, dapat mencapai standar minimal.

Kemudian peruntukannya disesuaikan dengan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS). Evaluasi proses terhadap program kegiatan sekolah yang berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun awal tahun. Proses penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran sekolah dan kegiatan pengembangan SDM guru dilakukan secara bertahap setiap semester.

Pada kegiatan evaluasi proses implementasi program yang berkaitan dengan penjadwalan pencairan dana BOP dengan kegiatan yang telah diprogramkan sekolah bahwa dana BOP yang sumbernya dari BPPAUDNI Regional VII Palembang, kemudian dana ini ditransfer ke lembaga-lembaga yang diharapkan dapat meningkatkan APBD daerah, selanjutnya dana ini dikelola oleh lembaga yang akan diawasi oleh komite sekolah/ masyarakat. Jadi tidak terjadi keterlambatan- keterlambatan yang sering terjadi misalnya dana dicairkan melalui pemerintah Provinsi- ke Kabupaten/Kota biasanya akan menempuh beberapa tahapan dan pastinya memerlukan waktu yang lama, tetapi dana BOP langsung diberikan ke lembaga masing-masing setelah lembaga mengajukan proposal dan diseleksi oleh Diknas terkait¹⁰.

Berdasarkan ada dapat dilihat bagaimana proses penyaluran dana BOP, (1) penyusunan dana bantuan dalam pemberian nilai dengan kategori cukup sesuai 10% kategori sesuai sebesar 70%

dan sangat sesuai sebesar 20% (2). Penilaian dan verifikasi proposal pada kategori cukup sesuai sebesar 10% kategori sesuai sebesar 85% dan sangat sesuai sebesar 5%, (3) penetapan penerima bantuan untuk kategori cukup sesuai sebesar 10%, sesuai sebesar 65% dan sangat sesuai sebesar 25%, (4). Penandatanganan akad kerjasama antara pemerintah pusat, diknas kota dan lembaga dengan kategori cukup sesuai sebesar 20%, sesuai sebesar 55% dan sangat sesuai sebesar 25%, (5). Proses penyaluran dana bantuan untuk kategori cukup sesuai sebesar 10%, sesuai sebesar 60% dan sangat sesuai sebesar 30%. (6) jadwal pengajuan dana bantuan BOP dengan kategori cukup sesuai sebesar 15% dan kategori sesuai sebesar 65% serta 20% untuk kategori sangat sesuai. (7) pengelolaan dana bantuan pada kategori sesuai sebesar 10%, 60% untuk kategori sesuai dan sangat sesuai sebesar 30%. (8) pelaporan penggunaan dana BOP pada kategori cukup sesuai terdapat 20%, 60% pada kategori sesuai dan 20% pada kategori sangat sesuai.

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa, pada program dana BOP dari awal sampai akhir yaitu terlaksananya dana BOP tidak terdapat kendala yang berarti. Dalam hal pengajuan proposal mengumpulkan data yang akurat agar dapat melihat lembaga mana yang berhak mendapatkan dana BOP, dan selanjutnya untuk memutakhirkan data penerima bantuan BOP dengan membuat tim komite yang melibatkan orang tua murid atau masyarakat dalam hal ini untuk mengawasi bagaimana proses dana BOP, kemudian terakhir yaitu pelaksanaan dana BOP dari penyaluran bantuan yang melalui rekening lembaga masing- masing hal ini dilakukan untuk

¹⁰Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal Kementerian Pendidikan

Nasional, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Tahun 2017, hal. 9-10

menghindari menyelewengan-penyelewengan dari pihak tertentu, pengawasan yang melibatkan masyarakat untuk mengawasi agar dana BOP tersebut benar-benar dipergunakan sesuai dengan ketentuan hingga pelaporan awal maupun akhir.¹¹

4) Komponen *Product*

Evaluasi program dalam komponen *product* adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program yang dibuat PAUD Kota Bengkulu berdasarkan program pemberian dana BOP.¹² Ruang lingkup evaluasi pada tahapan hasil yaitu melihat keterserapan dana BOP meliputi: Terlaksananya penggunaan dana BOP dengan baik pada semua fasilitas pendukung pembelajaran, Tercapainya hasil yang diharapkan dari dana BOP bagi lembaga serta tercapainya hasil yang diharapkan dari dana BOP bagi diknas pada lembaga dana penerima BOP. Mutu lembaga PAUD merupakan penentu dalam keberhasilan program dana BOP, proses pembelajaran yang baik akan menentukan hasil perkembangan peserta didik, untuk mendapatkan gambaran efektivitas hasil secara akademis dilakukan analisis dokumen hasil observasi ke PAUD untuk melihat bagaimana mutu layanan PAUD baik itu Kelompok Bermain, TK, dan TPA atau layanan khusus.¹³ Pelaksanaan proses pembelajaran di PAUD mengacu pada permendiknas no 137 tahun 2014 tentang standar satuan pendidikan anak usia dini, dijelaskan bahwa standar pendidikan anak usia dini memiliki beberapa standar dari standar tingkat

pencapaian perkembangan ini meliputi: aspek sosial emosional, agama, bahasa, fisik motorik, kognitif dan seni. Selanjutnya standar isi mengenai program-program yang menjadi acuan pengembangan pembelajaran di PAUD, bentuk kegiatan, alokasi waktu dan rombel belajar. Standar proses meliputi perencanaan, prinsip-prinsip, pelaksanaan. Standar penilaian meliputi teknik penilaian, lingkup, proses penilaian, pengelolaan hasil serta tindak lanjut. Standar pendidik dan tenaga kependidikan hal ini menjelaskan kualifikasi akademik seorang pendidik PAUD. Selanjutnya standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan yang meliputi *Context, Input, Process* dan *Product*. Pada setiap komponen mempunyai nilai dan implementasi yang berbeda-beda, ada yang setuju dengan kebijakan yang ada dan ada yang kurang merespon atas kebijakan itu. Terkadang walaupun kebijakan yang sudah dibuat menurut pemerintah sudah baik namun belum tentu dengan hasil yang didapat dilapangan. Pada komponen **Context** yang dilihat dari dasar hukum tentang undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Perlindungan anak mengatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan Lembaga mengatakan bahwa Lembaga akan mendapatkan bantuan operasional penyelenggaraan rata-rata biaya pelaksanaan

¹¹ Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Tahun 2017, hal. 9-10

¹²Ratih Permata Sari, *Dampak Akreditasi Terhadap Mutu PAUD di KB Al Amin Desa Sumber*

Bendo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, Jurnal Tinta, Vol. 1 No. 1, Maret 2019

¹³ Baiq Rohiyatun, *Pengelolaan Biaya Pendidikan yang Efektif pada Pelaksanaan Program Kegiatan PAUD Rinjani Sebagai Lembaga Trifungsi Pendidikan (TPA, KB dan TK)*, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 4. No. 1, 2018

pembelajaran termasuk dalam biaya operasional penyelenggaraan pada PAUD. Dengan adanya kebijakan, baik pemerintah maupun instansi yang terkait sangat banyak membantu. Dilihat dari hasil angket yang didapat dengan tetap mengacu pada kebijakan yang ada, hampir lebih dari 60% lembaga memberikan nilai yang baik ataupun sesuai pada setiap aspeknya mulai dari tujuan, manfaat dan tepat sasaran.

Dengan diberikannya sosialisasi di awal penyampaian tentang dana BOP ini memberikan apresiasi yang luar biasa dari setiap kalangan lembaga walaupun antara kebijakan yang ada dan realita yang terjadi dilapangan tidak mendapatkan pengaruh yang sama dalam artian antara yang diharapkan dengan implementasi dilapangan masih kurang contohnya pada jumlah anak, karena dirasa kurang adil jika lembaga yang mempunyai jumlah anak lebih banyak mendapatkan jumlah besaran dana sama. Adapun pada komponen **input** pada perencanaan penyaluran dana, dari kebijakan yang telah dibuat dengan memberikan kemudahan pada setiap lembaga yang mendapatkan dana bantuan operasional penyelenggaraan. Dengan memberikan kemudahan itu setiap lembaga akan lebih mudah dalam memproses dana yang diberikan terlihat dari hasil yang didapat lebih dari 70% responden yang memberikan nilai sesuai. Jika pada komponen input perencanaan penyaluran dana sudah cukup membantu. Pada komponen **proses** yang dilalui dalam proses pencapaian dalam dana bantuan operasional penyelenggaraan, setiap lembaga harus melalui sistematika yang ada mulai dari penyusunan dana, verifikasi dari diknas terkait, penetapan penerima, penandatanganan akad, penyaluran dana bantuan, jadwal pengajuan dana, pengelolaan dana bantuan, serta pelaporan baik awal maupun akhir. Setiap lembaga sudah merasakan sisi positif dari kebijakan yang ada pada prosedur penyaluran dana yang akan dilakukan kepada setiap lembaga penerima dana BOP akan melalui tahapan proses yang harus dilakukan memang

tidak semua lembaga yang memberikan apresiasi yang baik, ada yang hanya merespon biasa namun ada lembaga yang memberikan apresiasi yang jauh lebih baik terlihat dari hasil yang didapat pada komponen proses ini banyak lembaga yang memberikan nilai lebih dari 60%.

Sedangkan pada komponen **produk**, hasil yang diinginkan dari adanya bantuan dana BOP sungguh sangat terlihat jelas dari lembaga yang sudah memberikan citra yang baik dimata provinsi maupun nasional. Prestasi lembaga dapat dilihat dari salah satu PAUD yang menerima dana BOP mendapatkan penghargaan sebagai lembaga terbaik nasional yang menerapkan pembelajaran PAI untuk anak usia dini, begitu juga untuk guru prestasi salah satu lembaga gurunya mendapat predikat guru prestasi tingkat nasional yaitu PAUD Negeri Pembina 1 Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Heru Winarsi, *Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (Bop) Pada Kelompok Bermain Ceria Kota Semarang*, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah Untag Semarang Issn : 2302-2752, Vol. 8 No. 1, 2019
- Putri Sianturi, Dkk, *Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (Bop) Paud (Pendidikan Anak Usia Dini) Menerapkan Metode Electre (Studi Kasus : Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun)*, Komik (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer) , Volume I, Nomor 1, Oktober 2017
- Amin Nasir, *Dinamika Pengembangan Sistem Pendidikan (Kerangka Dasar Potensi Anak Usia Dini)*, Jurnal Ath-Tufula, Stain Kudus, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2014

Warul Walidin, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Banda Aceh: Ftk Arraniry Aceh, 2015

Noeng Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Tp, 1996

Madaus, G.F., Scriven, M.S., & Stufflebeam, D.L., *Evaluation Models, Viewpoints On Educational And Human Services Education*, Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing, 1993

Bogdan, Robert C. And Taylors K.B. *Qualitative Researctch For Education An Introduction To Theory And Metdods*. Boston: Ally And Bacon Inc, 1992

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

Hasan Baharun, *Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam*, Jurnal Ilmu Tarbiyah "At-Tajdid", Vol. 5 No. 2, Juli 2016

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Tahun 2017

Ratih Permata Sari, *Dampak Akreditasi Terhadap Mutu PAUD di KB Al Amin Desa Sumber Bendo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang*, Jurnal Tinta, Vol. 1 No. 1, Maret 2019

Baiq Rohiyatun, *Pengelolaan Biaya Pendidikan yang Efektif pada Pelaksanaan Program Kegiatan PAUD Rinjani Sebagai Lembaga Trifungsi Pendidikan (TPA, KB dan TK)*, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 4. No. 1, 2018